



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 840/XI/2014

II/NOVEMBER 2014



Pimpinan DPR Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi



Pimpinan DPR Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi

Pimpinan DPR RI mendukung penuh pemerintahan Presiden Jokowi, karena saat ini Jokowi tidak hanya presiden untuk satu kelompok saja, melainkan Presiden seluruh rakyat Indonesia, termasuk Pimpinan DPR saat ini. Jadi, sejatinya antara Pimpinan DPR dan pemerintah telah terjadi komunikasi dan sinergitas yang cukup baik.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Setya Novanto saat mengunjungi Kantor Redaksi Harian Kompas, didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Taufik Kurniawan, Selasa (4/11), di Palmerah, Jakarta.

“Salah besar kalau dikira kami (Pimpinan DPR) akan memboikot langkah atau program pemerintahan Jokowi, sebagaimana kekhawatiran sebelum Jokowi dilantik yang tidak terbukti sama sekali,” jelas Novanto kepada jajaran Redaksi Harian Kompas.

Rikard Bagun, Pemimpin Redaksi Harian Kompas pada kesempatan itu mencoba urun rembug atas kondisi yang tengah terjadi di DPR RI saat ini. Ia mengatakan bahwa kunci dari segala permasalahan yang terjadi di DPR adalah melalui komunikasi yang baik. Oleh karenanya, ia berharap agar gejolak yang tengah terjadi di DPR itu tidak sampai berlarut-larut.

“Sejak pemilu sampai sekarang bisa dikatakan kita hanya bisa bergerak di tempat. Energi yang dikeluarkan bergerus ke dalam, berputar dalam medan yang sama, akhirnya kita hanya bisa menonton, jangan-jangan keduanya kelelahan dan kemudian berhenti. Dan menurut kami komunikasi *is a part*



Pimpinan DPR RI saat berdialog dengan Redaksi Harian Kompas dan jajarannya

of solution,” ujar Rikard.

Pada kesempatan tersebut, Novanto mengapresiasi dan berterima kasih atas sambutan dan masukannya kepada DPR. Dijelaskannya, bahwa sejak awal Pimpinan DPR telah mencoba melakukan musyawarah untuk mufakat. Sejak Paripurna pertama, kedua dan ketiga, bahkan sebelum Presiden mengumumkan Kabinetnya, komunikasi dengan berbagai pihak termasuk KIH juga sudah dilakukannya. Namun memang belum ditemukan titik temu dari semua permasalahan yang ada. Meski demikian, hingga saat ini Setya Novanto mengatakan masih terus mengkomunikasikan hal itu.

Ketua DPR juga berterima kasih atas

dukungan Kompas selama ini kepada DPR RI. Bahkan pada saat isu boikot yang akan dilakukan oleh DPR atas pelantikan Presiden beberapa waktu lalu tidak terbukti, Kompaslah yang turut menyajikan kepada masyarakat atas ketidakbenaran kekhawatiran tersebut.

Ia berharap sebagai salah satu media terbesar, ke depan Kompas dapat terus bekerjasama dengan DPR dalam membangun Indonesia dan untuk kemakmuran bersama. Bahkan untuk hal itu Novanto tak segan untuk menerima kritik yang bersifat konstruktif. Dengan begitu pihaknya dapat langsung mengevaluasi apa yang menjadi kekurangannya tersebut. (Ayu) *foto:ryl/parle/iw.*



Pasar Tradisional Harus Mampu Bersaing

Tahun 2015 pasar nasional kian terbuka dengan pemberlakuan AFTA dan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Produk-produk impor akan membanjiri pasar lokal. Dan pasar tradisional tak boleh kalah dalam merebut persaingan.

Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), menyatakan, perlu ada pembinaan menyeluruh kepada para pedagang pasar tradisional sekaligus meningkatkan pengelolaan pasarnya. Dengan begitu, keberadaan pasar tradisional tetap eksis di tengah persaingan global. Selama ini, pengelolaan pasar dan pembinaan para pedagangnya masih belum optimal dilakukan.

“Kalau tidak segera kita bina ekonomi kerakyatan ini, mereka akan semakin jauh dan kalah bersaing. Ini juga



Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir

yang menjadi titik berat kita dalam meningkatkan kemampuan rakyat. Bukan rahasia umum lagi, jika kita tidak siap maka kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya usai menerima pengurus Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) di DPR, Rabu (5/11).

Konsep bagaimana membangun pasar tradisional yang baik harus terus dilakukan agar tak tersingkir oleh tumbuhnya pasar-pasar modern. “Pemerintah harus memberi perlindungan bagi pasar tradisional dari menjamurnya pasar modern. Pasar modern biasanya lebih agresif merebut konsumen,” ungkap Hifisz.

Program Pemerintahan Jokowi yang ingin membangun 5000 pasar tradisional mestinya ditujukan untuk merevitalisasi pasar-pasar yang rusak dan kumuh, agar tetap nyaman dan aman didatangi para konsumen. Menurut Hafisz, program pembangunan 5000 pasar ini masih belum jelas betul, ke mana arahnya. Untuk itu, pihaknya kelak akan bertanya kepada menteri terkait dalam raker dengan Komisi VI nanti. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Pimpinan Komisi VI DPR saat menerima karyawan Merpati Nusantara Airlines

Delegasi karyawan Merpati Nusantara Airlines kembali mendatangi Komisi VI DPR untuk mengadukan nasib status pekerjaannya. Hingga kini, belum ada kejelasan dari pihak pemerintah menyangkut kesejahteraan hidupnya. Untuk itu, mereka mendesak DPR agar kembali mengingatkan Menteri BUMN atas semua rekomendasi yang pernah disampaikan Komisi VI.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Delegasi Karyawan Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan Pimpinan Komisi VI DPR, Kamis (6/11). Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir (F-PAN) dan Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan (F-Gerindra), menerima aspirasi para karyawan MNA. Komisi VI sangat memahami kesulitan hidup para karyawan yang hingga kini tidak jelas nasibnya. Antara tetap menjadi karyawan atau sudah di-PHK tidak dijelaskan oleh pemerintah.

Karyawan Merpati Kembali Adukan Nasib ke Komisi VI

Seperti diketahui, Komisi VI DPR sudah mengeluarkan rekomendasi penyelesaian nasib para karyawan MNA ini pada 12 Juli 2014 lalu. Komisi VI telah membentuk Panja Merpati. Sayangnya, rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti Menteri BUMN yang saat itu dijabat Dahlan Iskan. Kini, sudah mendekati akhir tahun, rekomendasi tersebut tidak juga direspon. Dan para karyawan tentu semakin resah.

“Tentu saja kami punya kewajiban untuk memonitor apa saja yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan rekomendasi hasil Panja tanggal 12 Juli 2014 yang lalu. Kewajiban pemerintah untuk mem-follow up rekomendasi Panja tersebut, karena ini merupakan keputusan resmi dari DPR. Saya kira batas waktu pun sudah jelas, tidak lebih dari 1 tahun. Kalau sudah menjelang Desember ini, mereka sudah resah,” kata Achmad Hafisz Tohir.

Dalam pertemuan tersebut, Heri Gunawan Wakil Ketua Komisi VI DPR membacakan secara lengkap rekomendasi Panja Komisi VI. Menurutnya rekomendasi itu sangat baik dan sudah menyuarakan tuntutan para karyawan

MNA. Hanya saja hingga kini Kementerian BUMN mengabaikan rekomendasi tersebut. Dan Komisi VI pun segera akan menjadwalkan pertemuan dengan Menteri BUMN yang baru Rini Soemarno.

Sementara itu, para karyawan MNA satu per satu mengutarakan keluhannya sepanjang hampir satu tahun terakhir ini. Karena sudah lama tak mendapat gaji, banyak yang tak mampu lagi membiayai kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Akses listrik dan air banyak yang sudah dicabut, karena tak mampu bayar tagihan. Bahkan, perabot rumah tangga pun sudah habis terjual untuk menutupi kebutuhan hidup.

Mereka tentu ingin kejelasan status pekerjaannya. Bila MNA ingin dihidupkan kembali, segera disehatkan agar karyawan bisa kembali menerima gaji bulanan. Bila ingin ditutup, para karyawan pun minta segera diberi pesangon. Sudah bertahun-tahun mereka terombang-ambing dalam ketidakjelasan status. (mh) foto: iwan armanias/parle/iw

WNI Harus Dilindungi



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Fadli Zon menegaskan, Warga Negara Indonesia (WNI) dimanapun harus mendapat perlindungan dari negara. Hal ini diungkapkan Fadli, menanggapi kasus tewasnya dua WNI di Hongkong, yaitu Sumarti Ningsih dan Jesse Lorenna alias Seneng Mujasih. Kedua wanita tersebut dibunuh secara sadis oleh seorang bankir, Rurik Jutting.

“Perlindungan dan proteksi harus diberikan, apapun masalah yang dihadapi WNI, karena ini adalah amanat dari konstitusi untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia,” jelas Fadli usai menerima *Senior Associate Carnegie Endowment Foundation* Vikhram Nehru, di Gedung Nusantara III, Rabu (5/11/14).

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, perlindungan kepada WNI harus diberikan secara maksimal, mengingat hal ini menyangkut harkat dan martabat bangsa. Apapun masalah yang dihadapi WNI di luar negeri, seperti diduga membunuh atau melakukan kekerasan, ataupun masalah lain, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi WNI, minimal memberikan bantuan hukum dengan maksimal.

“Termasuk, jika WNI itu Tenaga Kerja Indonesia ilegal. Walaupun ilegal, kita harus lindungi, kita harus berikan edukasi bahwa yang dilakukan itu salah. Biar pun TKI ilegal, kalau di apa-apakan oleh negara lain, tidak boleh kita bi-

arkan. Walaupun itu ilegal harus kita lindungi,” tegas Fadli.

Fadli menilai, Indonesia memiliki Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tersebar di seluruh negara sahabat Indonesia, sehingga WNI dapat meminta bantuan dari KBRI. Namun, diperlukan proaktif dari WNI tersebut, dengan mendaftarkan dirinya di catatan Kedubes.

“Kita punya perwakilan punya KBRI di masing-masing negara yang punya hubungan dengan kita. Seharusnya memang setiap WNI yang datang kesana mendaftarkan, kecuali turis, sehingga pihak KBRI tahu apa yang terjadi. Paling tidak mereka akan lebih cepat tanggap dimana posisi WNI-nya,” imbuh Fadli.

Terakhir, ia menuntut KBRI agar lebih pro aktif dan tidak hanya menunggu laporan saja. “Tapi juga membuka pintu KBRI itu demi kepentingan masyarakat Indonesia yang ada di luar atau di negara tersebut,” tutup Fadli. *(sf,maf)/foto:andri/parle/iw.*

Program KIS Jangan Tumpang Tindih Dengan BPJS Kesehatan

Anggota DPR Komisi IX Budi Supriyanto menekankan agar program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan jangan sampai tumpang tindih. Hal ini disampaikan kepada pers di lobby ruang rapat paripurna DPR, Selasa (04/11). Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa Kartu Indonesia Sehat itu sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kalau transformasi ke KIS tentunya harus ada data terlebih dahulu tidak kemudian langsung disebar, sebab akan menjadi tumpang tindih. Jangan - jangan yang sudah punya BPJS tiba-tiba dapat lagi KIS,” katanya.

Politisi partai Golkar ini menambahkan, bahwa Komisi IX akan terus mengevaluasi BPJS Kesehatan agar tepat sasaran dan juga tidak tumpang tindih dengan Kartu Indonesia Sehat. Menurutnya, BPJS Kesehatan saja masih banyak perbaikan-perbaikan baik dari data statistik maupun data kependudukan agar benar-benar tepat sasaran.

“BPJS masih kita evaluasi, kami sering menjumpai orang yang mampu dapat kartu BPJS atau Jamkesmas dan yang tidak mampu tidak dapat BPJS atau Jamkesmas. Jadi orang



Ketua DPR RI Setya Novanto berdialog dengan Anggota Komisi IX Budi Supriyanto

yang mampu malah dapat BPJS, sementara yang tidak mampu malah tidak dapat. Dan ini harus segera dievaluasi,”

tambahnya.

Menurutnya lagi, BPJS itu berjalan dengan undang-undang, yaitu Undang-undang tentang BPJS. Jika diubah menjadi Kartu Indonesia Se-

hat maka harus mengubah undang-undang, yaitu undang-undang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Karena BPJS itu berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR menganggarkan 19 triliun untuk 86 juta jiwa yang tidak mampu,

sehingga menurutnya harus ada pembahasan serius terkait transformasi BPJS Kesehatan ke Kartu Indonesia Sehat. (mp,yd,rie)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Tidak Benar, Megaprojek JSS Tiba-tiba Dibatalkan

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menegaskan, tidak benar jika Pemerintahan dibawah Presiden Jokowi tiba-tiba menghentikan megaprojek Jembatan Selat Sunda (JSS). Pasalnya proyek ini sudah dirancang dan diputuskan pemerintah sebelumnya serta dilakukan studi kelayakan yang panjang serta telah ada Kepresnya.

“Ini menunjukkan pemerintah menganut manajemen sporadis. Manajemen seperti ini tidak benar. Mestinya diperhatikan dulu apakah proyek ini masuk prioritas Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) atau tidak. Jadi tidak bisa tiba-tiba dihentikan,” kata politisi PKS ini di Jakarta, Kamis (6/11).

Hal itu dikemukakan Sigit menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan megaprojek Jembatan Selat Sunda (JSS). Penghentian proyek seharga Rp 200 triliun tersebut disebabkan banyak pertimbangan, salah satunya tidak selarasnya dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini. Sehingga



Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghentikannya.

Sofyan mengatakan, sejak proyek tersebut dimunculkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak kalangan yang menilai pesimis rencana jembatan terpanjang di dunia itu bakal terwujud. Biaya pembangunan jembatan itu dianggap terlalu besar, di sisi lain dampak yang dihasilkan terhadap sektor kemaritiman dianggap minim. “Itu masih ide dan wacana. Dan memang belum memutuskan *go a head* juga sejak dulu,” kata Sofyan.)

Pembangunan JSS yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diperkirakan memakan waktu 10

tahun. Jika proyek dimulai 2013, dengan studi kelayakan selama 2 tahun, maka pembangunan JSS akan selesai pada tahun 2025.

Menurut Sigit, saat ide pembangunan mega proyek itu dilontarkan, pihaknya menyatakan tidak setuju. Namun karena saat itu Kementerian PU tetap “*keukeuh*” akhirnya Komisi V menyatakan persetujuannya. Karena itu, kalau sekarang dihentikan secara tiba-tiba, bagaimana pekerjaan, dana dan sumber daya dari PU yang telah disiapkan selama ini.

Sebelum memutuskan atau membatalkan suatu proyek, anggota dewan ini menyarankan sebaiknya dibicarakan dulu. Kalau akan mengalihkan kepada pembangunan pelabuhan, dermaga atau pembelian kapal-kapal nelayan untuk mendukung visi negara maritim Presiden Jokowi, itupun harus dibicarakan dengan DPR.

“Intinya pemerintah dengan manajemen sporadis semacam ini tidak benar, bahkan kerjanya akan kedodoran,” kata Sigit menambahkan. (mp) foto: naefurodjie/parle/hr.

Komisi III DPR Sudah Bekerja

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menerima pengaduan masyarakat terkait persoalan hukum yang sedang dihadapi. Agenda rapat tetap berjalan walaupun belum dihadiri oleh perwakilan fraksi secara lengkap.

“RDPU ini menerima aspirasi dari publik tidak ada tema khusus, semua boleh mengadukan permasalahan hukumnya kepada Komisi III,” kata Ketua Komisi III Aziz Syamsudin kepada

wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/14).

Rapat diikuti oleh anggota dari lima fraksi sedangkan FDIP, FP Hanura, FP Nasdem dan FPKB sampai saat ini belum menyerahkan nama anggotanya untuk bertugas di komisi yang mendiagnosis masalah hukum dan keamanan ini. Anggota Fraksi PPP yang sudah menyerahkan daftar nama namun tidak hadir dalam pertemuan tersebut.



Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin

Walaupun belum dihadiri oleh seluruh seluruh fraksi, Pimpinan Komisi III tetap berkomitmen melaksanakan rapat. “Kita tetap bekerja saja, the show must go on,” papar politisi Fraksi Partai Golkar yang periode sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua

Komisi III.

Dalam RDPU tersebut hadir menyampaikan pengaduan Delegasi Masyarakat Korban Diskriminasi Polri. Kasus yang dilaporkan antara lain sengketa merek aki kendaraan bermotor

yang mandeg ditangan polisi, kasus DPO seorang warga yang sudah berjalan selama tiga tahun dan lambannya upaya Polri dalam mengungkap kasus kematian seorang warga di Sumut yang tertimpa tembok pabrik. (iky)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Fadli Zon Diskusi Perkembangan Politik Indonesia dengan Vikhram Nehru



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Senior Associate Carnegie Endowment Foundation Vikhram Nehru

Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Kopolkam) Fadli Zon menerima kunjungan Senior Associate Carnegie Endowment Foundation Vikhram Nehru, yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat. Walaupun pertemuan berlangsung tertutup, Fadli sempat memberikan keterangan pers dengan beberapa media, usai pertemuan.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, pertemuan ini membahas tentang perkembangan politik di Indonesia. Apalagi, Vikhram yang merupakan cucu dari negarawan India, Jawaharlal Nehru, adalah seorang akademisi dan

politik, yang sangat mengamati kondisi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

“Pak Vikram Nehru ini bekerja untuk Associate Carnegie Endowment Foundation yang banyak mengamati perkembangan di Indonesia, termasuk perkembangan politik terakhirdi Indonesia, dengan (adanya) Pilpres maupun (kondisi) di Parlemen,” jelas Fadli, di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (5/11).

Fadli mengaku, Vikhram lebih banyak bertanya tentang kondisi politik kepada dirinya, sehingga tidak ada masukan yang diberikan untuk DPR. Fadli pun menjelaskan secara terbuka tentang bagaimana kondisi Parlemen saat ini.

“Masukan sih tidak ada. Dia banyak bertanya tentang beberapa perkembangan bagaimana pemilihan di DPR dan MPR, kemudian tentang Perppu, termasuk koalisi-koalisi yang terbentuk,” imbuh Fadli.

Dalam pertemuan itu, Fadli juga sempat menyampaikan kondisidemokrasi di Indonesia akan menjadi lebih dinamis ke depan karena adanya pengelompokan.

“Dia juga bertanya sampai kapan koalisi ini bisa bertahan, dan saya katakan tergantung pada proses politik dan proses komunikasi di koalisi. Pada dasarnya semua ini bergerak kepada kepentingan nasional,” tutup Fadli. (sf)

foto: andri/parle/iw.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon merasa heran terkait rencana presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

DPR Heran Terkait Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM

Rencana kenaikan itu dianggap tidak relevan dengan harga minyak dunia saat ini.

“Asumsi harga BBM di APBN kita sekarang itu 105 dollar US per barel. Sementara, harga minyak dunia itu hanya 82 dollar US per barel. Harusnya turun dong, kenapa malah naik?” kata

Fadli kepada media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

Ia mencontohkan saat pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM, awal 2009 silam. Kebijakan tersebut, kata Fadli, diambil pemerintah saat itu lantaran harga minyak dunia mengalami kenaikan.



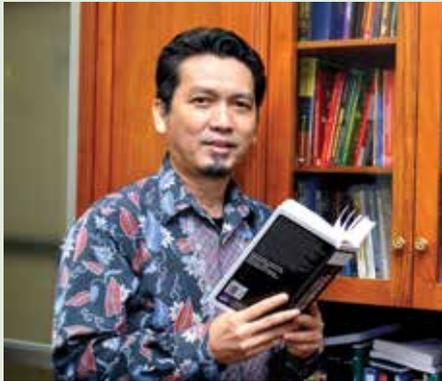
Ia pun tidak setuju jika alasan pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM adalah karena penggunaannya yang tidak tepat sasaran. “Kalau alasannya yang pakai bensin bersubsidi tidak tepat sasaran, dari 20 tahun lalu juga ngomongnya itu, argumentasi rutin saja,” ujar Fadli.

Namun, jika memang alasannya demikian, Fadli mengkritik mengapa pemerintah tidak menyiapkan sistem dan perangkat aturan badan terlebih dahulu agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Ia yakin tanpa persiapan sistem dan perangkat badan, kekacauan sosial akan terjadi.

“Yang susah rakyat miskin, yang tidak mampu mengejar harga BBM yang naik. Kan kalau harga BBM naik, harga-harga lain juga naik,” ujar dia. “Kalau saya pribadi, tidak ada keharusan agar BBM naik. Tidak perlu, karena harga minyak dunia itu turun,” tambahnya.

(sc)/foto: iwan armanias/parle/iw.

KMP dan KIH Bersatu Hadapi Wartawan



Anggota Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf

Panasnya dinamika politik diantara anggota dua kelompok besar fraksi di DPR yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) adalah bagian dari persaingan politik yang wajar dan masih dalam bingkai aturan perundangan-undangan. Per-

bedaan itu ternyata tidak berdampak pada hubungan personal diantara anggota dua koalisi ini.

“Panasnya dinamika politik, tidak boleh berimbas pada hubungan antar personal sesama anggota DPR. Hubungan kita baik-baik saja, itulah sebabnya KMP dan KIH akan bersama menghadapi teman-teman wartawan dalam pertandingan sepakbola, katakanlah ini seperti diplomasi bola dalam waktu dekat,” kata anggota Komisi III Al Muzammil Yusuf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/14).

Politisi Fraksi PKS yang masih aktif bermain sepak bola ini mengatakan akan mengkoordinir anggota DPR yang tergabung dalam KMP. Sementara di pihak KIH anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Akbar Faisal yang

menjadi koordinator.

“Syukur-syukur para pimpinan DPR, fraksi, dan bahkan pimpinan partai bisa bergabung dan menindaklanjuti diplomasi lapangan hijau ini. Pembicaraan dengan teman-teman wartawan di Koordianariat Parlemen juga sudah dilakukan, kita putuskan waktunya hari Selasa (11/11) yang akan datang,” tuturnya.

Ia berharap pesan penting lewat diplomasi sepak bola ini bisa sampai di publik, kerasnya perbedaan politik tidak boleh merusak silaturahmi diantara anak bangsa. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung ini meyakini dalam waktu tidak terlalu lama lagi serangkaian pembicaraan akan membuahkan hasil. (iky) foto: naefuro-djie/parle/hr.

Pimpinan DPR Agendakan Roadshow ke Redaksi Media Massa

Pimpinan DPR mengagendakan untuk mengunjungi beberapa kantor redaksi media massa nasional secara rutin. Menurut Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (KOREKKU) Taufik Kurniawan, kunjungan tersebut dimaksudkan selain untuk bersilaturahmi dan Ta’aruf atau perkenalan dengan Pimpinan DPR yang baru saja dilantik sebulan lalu, juga untuk menyerap berbagai aspirasi terkait dengan tugas dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat.

“Media sebagai salah satu stakeholder dari masyarakat, sehingga bisa menjadi jembatan antara DPR dan rakyat, perlu terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik. Meskipun Pimpinan dan DPR sendiri juga selalu mendatangi rakyat secara langsung. Oleh karena



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

itu, kami (Pimpinan DPR) mengagendakan secara rutin untuk roadshow ke beberapa kantor redaksi media massa sambil Ta’aruf atau perkenalan,” ujar Taufik usai mengunjungi Kantor Redaksi Harian Kompas, Selasa (4/11)

Ditambahkan Politisi dari Fraksi PAN ini, dari pertemuan dengan jajaran Redaksi Harian Kompas misalnya, Pimp-

nan DPR mendapat berbagai masukan yang salah satunya adalah kemelut atau konflik di elit politik, termasuk dalam tubuh DPR sendiri. Pertemuan itu juga digunakan Pimpinan DPR untuk menjelaskan ikhwal kemelut tersebut.

Lewat pemberitaan media massa Taufik yakin masyarakat Indonesia kini sudah semakin cerdas dalam melihat permasalahan yang ada. Masyarakat sudah tahu mana yang membuat miring dan mana yang tidak. Oleh karena itu, ia terus berharap dukungan masyarakat kepada DPR agar terus bisa melakukan control terhadap program dan kinerja pemerintah. Demi semata-mata untuk kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. (Ayu) foto: rizka/parle/iw.

Dewan Pertanyakan Anggaran KIS



Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Supriyatno

Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan Presiden Jokowi, Senin 3 Nopember 2014 banyak mendapat sorotan, termasuk kalangan Dewan sendiri. DPR mempertanyakan anggaran untuk KIS itu menggunakan anggaran yang mana.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Supriyatno akan mempertanyakan masalah ini kepada pemerintah. Menurutnya, program pemerintah ini bagus hanya darimana anggarannya sementara sudah ada BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan ada payung hukumnya. KIS belum ada payung hukumnya. Kita harus pertanyakan nanti anggarannya darimana, karena belum dibahas dengan DPR,” katanya kepada Parlemen sebelum sidang

Paripurna DPR, Selasa (4/11) di Gedung DPR, Jakarta.

Ia menginformasikan bahwa APBN-P 2014 sudah ditetapkan begitupula dengan APBN 2015. Tinggal APBN-P 2015. APBN 2015 bisa dilakukan perubahan setelah melewati tahun 2014.

“Kita akan pertanyakan, bahwa program-program pemerintah itu bagus hanya anggarannya dimana, jangan sampai menyalahi aturan. Ada KIS, KIP, dan ada Kartu Keluarga Sejahtera. Kesemuanya ini membutuhkan pendanaan yang cukup besar,” terang Supriyatno.

Ia menyatakan DPR belum bisa membahas mengenai KIS, karena payung hukumnya belum ada. Jika KIS silakan Presiden Jokowi sendiri, pemerintah sendiri. Sebelum pemerintah menyampaikan ke DPR mengenai program itu, tegasnya, DPR tidak akan merespon. Tapi jika BPJS akan direspon, karena BPJS untuk rakyat.

Menurutnya, pembiayaan dengan fasilitas kesehatan itu berbanding lurus. Tidak mungkin pembiayaannya kecil fasilitas kesehatannya bagus.

“Kasih rakyat juga nanti, jangan salah ya. Makanya besaran biayanya harus disampaikan dulu ke DPR. Berapa besaran biaya yang digunakan untuk KIS,” imbuhnya.

“Kalau BPJS jelas, semua aturan-

nya ada. Kalau KIS ini berapa, menggunakan sistem kartu atau asuransi, berapa premi yang harus dibayar,” tambahnya.

Semua program untuk rakyat, kata Supriyatno, harusnya disampaikan ke DPR dulu, tidak bisa begitu saja ada atau tiba-tiba ini menyangkut uang rakyat juga. DPR harus awasi. Jangan sampai rakyat senang tapi pelaksanaannya bermasalah.

“Misalnya pembiayaannya terlalu kecil, mana ada rumah sakit yang mau melayani, nanti dia bangkrut,” tukasnya.

Selain dibicarakan dengan DPR, harus diajak bicara pula *stakeholder* yang lain, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI).

“Karena berbicara Rumah Sakit berarti bicara mengenai fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya. Harus *win win solution*, bicara pemilik modalnya juga, kalau pemilik modalnya rugi terus dan pinjam di bank, nanti jadi masalah,” ujarnya lagi.

Diakui Supriyatno, rakyat tidak dipungut premi, karena KIS untuk rakyat miskin dan preminya dibayar oleh pemerintah. Sama seperti BPJS, BPJS untuk rakyat miskin preminya dibayar oleh pemerintah. (sc)/foto:iwan armarias/parle/iw.

Perlu Sinkronisasi Program KIS dan KIP dengan BPJS

Politisi Fraksi Partai Demokrat DPR Muslim berharap Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pemerintah Jokowi, agar berjalan sinkron dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Sebelumnya kan sudah ada BPJS yang diluncurkan Pak SBY. Sekarang sudah berjalan luar biasa, apakah KIS-

dengan BPJS bisa berjalan sinkron atau tidak. Harapan kita semuanya untuk kepentingan masyarakat bisa berjalan bersama” ujar Muslim kepada pers Selasa (4/11) di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Menurutnya, ke-efektifan KIS dan KIP belum diketahui saat ini, karena baru di luncurkan. “Mudah mudahan harapan kita kan tidak melihat siapa



Politisi Partai Demokrat DPR Muslim



presidennya, yang kita lihat kartu yang di luncurkan pemerintah ini benar-benar dinikmati oleh masyarakat, itu saja sebenarnya,” kata Muslim.

Dia menegaskan, KIP lebih diarahkan kepada kepentingan anak-anak

sekolah. Di sekolah dasar (SD) sudah ada bantuan untuk siswa miskin, dengan adanya KIP diharapkan akan benar-benar bisa membantu pendidikan masyarakat kelas bawah.

”Apapun harapan kita, program

Pemerintah SBY dan Pak Jokowi ada sinkronisasi, agar tepat sasaran dan bermanfaat untuk masyarakat. Semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia”. (mp,maf)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Angkat Jaksa Agung Sekelas Baharuddin Lopa

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa mengharapkan presiden segera mengangkat Jaksa Agung sekelas Baharuddin Lopa (alm). Sebagai Jaksa Agung ideal seperti Baharuddin Lopa, ada ketegasan, ada terobosan ada harapan.

Demikian dikemukakan Desmon saat ditemui pers sebelum Sidang Paripurna DPR Selasa (4/11). Menurutnya, untuk mencari Jaksa Agung sekelas Lopa memang susah, karena itu ia menduga Presiden akan menunjuk M. Yusuf yang sekarang ini menjabat Ketua PPATK sebagai Jaksa Agung baru.

Dalam pengamatan pimpinan Komisi III dari Fraksi Gerindra ini, sementara ini jaksa di KPK lebih hebat dari pada yang di Kejaksaan. Berarti pimpinan KPK lebih baik dari jaksa agung, pasalnya tidak ada kasus-kasus yang mandek di KPK, sementara perkara di Kejaksaan banyak perkara yang mandek.

”Akhirnya kalau mau lihat apa adanya termasuk penilaian masyarakat,



Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa

KPK lebih baik dari Kejaksaan. Kalau pun mengangkat Abraham Samad, itu hak prerogative Presiden,” ujar Desmon. Yang selanjutnya perlu dicermati apakah pengangkatan Jaksa Agung nanti dalam rangka penegakan hukum atau kepentingan politik. Kalau dalam

rangka penegakan hukum perlu kita kawal. Tapi kalau untuk kepentingan presiden, dalam ini harus dicermati, seperti Jagung Basrif Arief, tidak tegas juga.

Harapannya dengan Jaksa Agung baru, ia menekankan bisa membereskan dengan baik soal penuntutan, tidak bermain-main dengan penetapan tersangka, tidak tiba-tiba menerbitkan SP3. Ke depan, diharapkan dalam penetapan tersangka harus jelas. “Hari ini yang kita lihat kehilangan proses itu di kejaksaan. Jaksa Agung baru bisa nggak menghapus kesan orang yang berduit di SP3 dan yang masuk penjara orang yang tidak berduit,” tandas Desmon.

Ia menegaskan kembali, kalau dalam kepentingan hukum yang akan dipilih M Yusuf (Ketua PPATK). Tapi dalam rangka kepentingan politik, dia menebak Jampidus yang dipilih. Jaksa Agung tidak harus karir, dulu ada Jaksa Agung non karir yaitu Marsilam Simanjuntak dan Andi Galib dari kalangan militer. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Ketua DPR: Sekarang Saatnya Mendukung Pemerintah

Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan tidak memiliki masalah dengan pihak-pihak yang menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pimpinan DPR. Sejauh ini lembaga yang dipimpinnya terus menjaga untuk bekerja sesuai koridor demokrasi dengan aturan hukum.

”Kita tidak ada masalah dengan pihak-pihak yang diketahui bersama karena dasar kita bekerja adalah konstitusi UUD NRI 1945, UU MD3 yang sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dan peraturan DPR no.1/2014 tentang Tatib yang mengatur hak anggota,” katanya dalam konferensi pers di

Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/14).

Ia mengingatkan segenap pihak, sekarang adalah saatnya untuk mendukung kinerja pemerintah yang sudah membentuk kabinet dan tidak bisa menunggu lagi bekerja untuk rakyat. Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan DPR dalam posisi siap mendukung setiap program yang pro rakyat.

Untuk mengimbangi irama kerja pemerintah maka Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dibentuk harus



Jajaran Pimpinan DPR RI

segera ditetapkan mitra kerjanya. Agenda ini akan dibicarakan dalam rapat konsultasi pengganti Bamus yang dijadwalkan Senin (3/11).

“Pemerintah Jokowi-JK tentu tidak bisa menunggu lagi dan kita berkomitmen akan mendukung setiap program yang baik dan pro rakyat. Itulah sebabnya kita perlu segera menetapkan mitra kerja komisi dalam rapat konsultasi hari Senin, ditetapkan dalam paripurna dan komisi-komisi

segera bekerja,” tandasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA) Fahri Hamzah mengatakan hubungan DPR dengan Presiden Jokowi-JK sangat baik. Komunikasi itu sudah berhasil dibangun pada saat menyampaikan pandangan soal perubahan nomenklatur kementerian di Istana Negara.

“Kita sudah saling menerima, kami telah datang ke istana saat memberikan pertimbangan nomenklatur kementerian. Kerja sama ini tentunya akan kita teruskan,” tutur Fahri.

Politisi FPKS ini menyebut ide pemerintah mengembalikan kejayaan maritim Indonesia sebagai ide yang revolusioner yang perlu didukung. Ia meyakini tanpa kerja sama dan persatuan ide itu tidak akan terwujud.

“Ketua DPR sudah perintahkan Sekjen segera mengirimkan undangan kepada Menko Maritim. Kita tahu ini adalah menko baru belum punya kantor, belum punya anggaran. Kami ingin mendengar dari beliau dengan tentu dengan dukungan komisi yang membidangi kamaritiman,” demikian Fahri. (iky) foto:ry/parle/hr.

Paripurna DPR Tunda Pengesahan 3 Mitra Kerja Komisi

Rapat Paripurna DPR menunda pengesahan 3 mitra kerja komisi DPR, karena masih terjadi tarik ulur ke mana harus ditempatkan. Ketiga mitra kerja tersebut adalah 3 kementerian dengan nomenklatur baru yang masih belum disepakati oleh para anggota DPR yang hadir.

Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/11), mengesahkan semua mitra kerja komisi DPR, kecuali 3 kementerian, yaitu Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga kementerian tersebut sebelumnya sudah ditempatkan di komisinya masing-masing pada Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi pada Senin (3/11).

Saat dibawa ke Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, 3 kementerian tersebut ternyata belum mendapat kesepakatan bulat. Persoalannya menyangkut pembagian anggaran dan sektor kerja komisi yang terbelah. Misalnya, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. Unsur risteknya menjadi mitra kerja Komisi VII, sementara unsur pendidikannya menjadi sektor kerja Komisi X yang menangani bidang pendidikan. Sebelumnya, kementerian ini diusulkan masuk Komisi VII.

Tentu ini menyulitkan dialog dan koordinasi antara Komisi DPR dengan mitra kerjanya. Banyak interupsi yang bermunculan saat Rapat Paripurna tersebut menyangkut mitra kerja dengan nomenklatur kementerian yang baru ini.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna

Begitu juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada rapat konsultasi ditempatkan sebagai mitra kerja Komisi IV, ternyata belum bisa disepakati di Rapat Paripurna DPR. Pada periode sebelumnya, lingkungan hidup berada di Komisi VII dan kehutanan berada di Komisi IV.

Yang tidak kalah membingungkan lagi, penempatan mitra kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pada Rapat Konsultasi diusulkan masuk Komisi V. Sementara pada periode DPR sebelumnya, urusan desa masuk Komisi II, pembangunan daerah tertinggal masuk Komisi V, dan urusan transmigrasi masuk Komisi IX. Ke-

menterian dengan nomenklatur baru ini belum disepakati penempatan mitra kerjanya.

Akhirnya, Rapat Paripurna DPR memutuskan agar mitra kerja untuk 3 kementerian tersebut dibawa ke rapat gabu-

ngan DPR dengan mengundang 3 menteri terkait untuk mengetahui lebih dulu arah dan deskripsi kerjanya. Setelah itu DPR kembali akan mensahkan penempatan mitra kerja untuk 3 kementerian tersebut. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Kementerian BUMN Harus Awasi BUMN Yang Alami Kerugian

Kementerian BUMN yang dipimpin Menteri Rini Soemarmo harus lebih ketat mengawasi kinerja BUMN yang alami kerugian. Pembinaan dan pengawasan atas kinerja BUMN yang buruk merupakan keniscayaan, daripada harus dilikuidasi atau dimerjer.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana (F-PD) mengemukakan hal tersebut sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/11). Wacana merampingkan jumlah BUMN yang kini mencapai 142 perusahaan, menurut Azam juga tidak realistis. Wacana itu muncul karena ada beberapa BUMN yang kinerja keuangannya terus merugi.

“Sebetulnya bukan merampingkan, tetapi bagaimana BUMN itu diawasi, dibina, dan sehat. BUMN itu yang penting harus disehatkan. Bagaimana caranya, ya itu tugas Kementerian BUMN yang harus menyehatkan. Se-



Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana

lama ini kan banyak BUMN yang tidak dibina dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah,” papar Azam.

Kementerian BUMN, himbau Azam, jangan hanya mengawasi BUMN yang mengalami keuntungan besar saja. Yang tidak untung juga harus

didampingi terus. Bahkan, BUMN yang sudah mandiri dan punya keuntungan besar, tak perlu lagi diawasi, seperti PT. Semen Padang dan PT. Tambang Batubara Bukit Asam. Dua perusahaan besar itu tak perlu pengawasan ketat pemerintah. yang harus diperketat pengawasannya justru yang merugi, seperti PT. Merpati Nusantara Airlines atau PT. Kertas Leces.

Sementara itu, mengomentari soal target dividen BUMN dalam APBN 2015 sebesar Rp43,7 triliun yang harus disetor ke negara, Azam menilai, semua itu bergantung kinerja Pemerintahan Jokowi sekarang. Di pemerintahan sebelumnya target dividen Rp40 triliun sudah tercapai. “Mudah-mudahan sekarang tercapai. Kita harus yakin, walau kita belum tahu pemerintahan Jokowi seperti apa. Dan BUMN yang dari tahun ke tahun menguntungkan ternyata juga makin banyak.” (mh) foto:iwan armanias/parle/iw.

Jaksa Agung Jangan dari Parpol Atau Titipan Parpol



Wakil Ketua Komisi III DPR Benny. K. Harman

Politisi Partai Demokrat DPR Benny. K. Harman berharap, Jaksa Agung yang akan ditetapkan Presiden Jokowi tetap bisa menjaga independensinya. Jangan menjadi alat kekuatan politik. Oleh sebab itu ia meminta Jaksa Agung yang akan datang bukan dari partai politik, bukan pula titipan partai. “Saya harap Presiden memilih jaksa profesional, dan saya yakin banyak sekali jaksa di lingkungan kejaksaan agung yang memiliki kemampuan, integritas dan juga mempunyai program yang nyata untuk memperbaiki kejaksaan ke depan,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPR sebelum Rapat Paripurna DPR Selasa (4/11).

Menurutnya, banyak sekali tokoh di lingkungan kejaksaan yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang dia miliki bisa melakukan perombakan ke dalam, bisa meningkatkan kinerja kejaksaan dan tak kalah penting adalah dukungan masyarakat dan dukungan pers. “Ini juga penting untuk menjaga, mengawal kejaksaan yang akan datang,” kata Benny.

Dia menekankan lagi, untuk Jaksa Agung yang akan datang jangan yang berasal dari partai dan jangan titipan parpol. Dia punya independensi, karakter yang kuat dan tidak dipengaruhi kepentingan politik.

Tugas utama Kejagung lanjut dia, adalah melakukan program yang telah dilakukan selama ini yaitu reformasi dalam tubuh kejaksaan dan menjalankan tugas pokoknya sebagai institusi penegak hukum dan utamanya lagi menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. “Pemberantasan korupsi ke depan, gagal atau tidak tergantung

kepada penegak hukum salah satunya adalah Kejagung. Kejagung diharapkan menjadi motor pemberantasan korupsi dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan sampai tingkat desa,” ujarnya.

Dengan KPK yang juga sama-sama melakukan pemberantasan korupsi,

Benny berharap, Kejagung tetap menjalankan tupoksinya, *berholopis kuntul baris* dengan KPK dan kepolisian. “Saya yakin dengan ketiga institusi ini bekerja bersama-sama sesuai tupoksi masing-masing, maka pemberantasan korupsi akan berhasil,” ungkap Benny optimis. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Perampingan BUMN Belum Bisa Dilakukan

Jumlah BUMN yang mencapai 142 perusahaan belum bisa dirampingkan meskipun ada beberapa BUMN yang terus merugi. Penggabungan BUMN yang memiliki usaha sejenis juga butuh sinergitas dan pembicaraan mendalam.

Anggota Komisi VI DPR Refrizal (F-PKS) menyatakan hal tersebut sesaat sebelum Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/11). Menurut Refrizal, sejumlah BUMN yang merugi sebaiknya dilakukan pembinaan yang intens agar perlahan kinerjanya membaik. Ada UU No.19/2003 tentang BUMN yang mengatur semua urusan BUMN.

“Kalau dia dirampingkan konsekuensinya anak perusahaan itu tidak menjadi BUMN lagi. Ini yang kami di Komisi VI DPR masih mempertanyakan. Ini sama juga domba anaknya bisa ayam atau lainnya,” ungkap Refrizal. Dulu, sebagian BUMN didirikan, karena sektor usahanya belum ada yang dikelola swasta. Kalau kemudian, usaha BUMN yang dirintis itu memburuk dan tidak menguntungkan bagi negara, sebaiknya memang dibicarakan lagi dengan DPR.

Refrizal menambahkan, BUMN dituntut tetap sehat dan menyetorkan dividen ke negara. Dalam APBN 2015 ditetapkan, dividen BUMN yang harus disetor Rp 43,7 triliun. Untuk



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berjabat tangan dengan Anggota Komisi VI Refrizal

itu, keuntungan dari pengelolaan BUMN harus masuk kas negara, bukan masuk ke kas masing-masing BUMN. (mh) foto: iwan armanias/parle/iw

Setjen DPR Gelar Diskusi Bertajuk Ketahanan Pangan

Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara, yang berada di bawah Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar diskusi bertajuk Evaluasi dan Perencanaan Program Ketahanan Pangan. Acara ini merupakan diskusi lanjutan, dimana sebelumnya juga digelar diskusi dengan tema yang sama, namun narasumber yang berbeda.

Bertempat di ruang rapat Deputi Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR, Selasa (4/11), diskusi menghadirkan dua narasumber. Narasumber pertama adalah Direktur Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nono Rusono. Narasumber berikutnya, Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan Kementerian Pertanian Benny Rachman.

Dalam sesi diskusi, masing-masing narasumber menyampaikan paparannya. Nono menyampaikan paparan berjudul Evaluasi dan Perencanaan Bidang Ketahanan Pangan, sementara Benny membawakan materi tentang Ketahanan Pangan, Perkembangan dan Tantangan ke Depan. Usai paparan, tercipta suasana tanya jawab yang interaktif antara peserta dan narasumber.

Ditemui usai diskusi, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setjen DPR Setyanta Nugraha menyampaikan harapan, diskusi ini dapat menjadi bahan analisis dari seluruh staf Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. Selain itu, dapat menjadi referensi penyusunan buku bertema Ketahanan Pangan.

“Output dari diskusi ini adalah buku bertema Ketahanan



Suasana diskusi Bagian Analisa Pendapatan Negara dan Belanja Negara

Pangan. Buku ini akan membahas dari perspektif apakah alokasi anggaran sudah *match* atau belum dengan kebijakannya. Kita ingin memberikan informasi melalui buku yang akan kita susun ini dari persepektif kelembagaan, anggaran, maupun implementasinya,” jelas Totok, panggilan akrab Setyanta Nugraha.

Totok yakin, dengan diskusi dari dua perspektif yang berbeda, yaitu pengamat pangan Bustanil Arifin yang sudah dilaksanakan sebelumnya, ditambah diskusi dengan pelakunya, diharapkan analisis semakin komprehensif. Apalagi, nantinya buku ini akan digunakan oleh Anggota Dewan se-

bagai referensi ketika melaksanakan fungsinya.

“Pengetahuan yang terdokumentasi ini, yang kemudian dibukukan, bisa di-*share* ke seluruh *stakeholder*, terutama Anggota Dewan, sebagai referensi ketika DPR melaksanakan fungsinya. Harapannya, ada info tambahan dari buku ini yang dapat menjadi referensi Anggota Dewan dalam membahas dengan pemerintah. Hal ini sebagai *supporting system* Setjen DPR kepada Anggota Dewan,” ujar dia.

Dalam paparannya, Nono menyatakan bahwa ketahanan pangan itu bukan hanya mengedepankan peningkatan produksi pangan atau ketersediaan pangan semata, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan dari pelaku utama produksi pangan, seperti petani dan nelayan.

la menambahkan, program ketahanan pangan masih menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019, oleh karena itu, alokasi anggaran masih tetap menjadi perhatian untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan ini.

“Diskusi ini bagus sekali. Kami juga menerima masukan-masukan, baik itu melalui pertanyaan maupun saran yang disampaikan oleh peserta, termasuk dari narasumber yang lain. Penjelasan antar narasumber jadi saling melengkapi,” jelas Nono, usai diskusi. (sf)/foto:naefurodji/parle/iw.

Di Indonesia Tidak Ada Oposisi Frontal

Perkembangan demokrasi di Indonesia yang sangat maju juga menjadi perhatian dunia, termasuk Jerman. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Fadli Zon usai menerima kunjungan delegasi Parlemen Jerman, Senin (3/11) di Senayan Jakarta.

“Mereka (delegasi Parlemen Jerman-red) melihat perkembangan demokrasi di Indonesia yang sangat maju, termasuk perkembangan terakhir, terpilihnya pemimpin DPR yang berasal dari Partai-partai yang bukan bagian dari pemerintah. Ditanyakannya, apa ini tidak akan menimbulkan gejolak?” ungkap Fadli Zon.

Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini bahwa sejatinya oposisi di Indonesia ini tidak ada oposisi yang frontal, melainkan oposisi loyal. Dimana oposisi yang dimaksud tetap mengedepankan pada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat di



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

atas segalanya.

Dengan kata lain parlemen, meski berbeda partai dari pemerintah, tetap akan mendukung program yang disusun dan dilakukan pemerintah sepanjang itu tidak merugikan masyarakat. Namun jika ada program pemerintah merugikan rakyat, DPR tentu akan mengoreksinya.

“Semua itu sebenarnya hal yang

wajar dalam proses demokrasi. Jadi meski pimpinan DPR berasal dari partai yang berbeda dengan pemerintah, namun tetap akan bersinergi. Karena oposisi di Indonesia bukan oposisi frontal,” jelas Fadli Zon.

Ditambahkan Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Nurhayati Ali Assegaf, sebenarnya apa yang terjadi dalam politik Indonesia saat ini, dimana Pemerintah berbeda partai dengan pimpinan DPR juga sempat terjadi di masa Pemerintahan SBY di tahun 2004 silam. Ketika itu Partai Demokrat sebagai Partai Pengusung SBY tidak mendapat kursi pimpinan di DPR. Namun ketika itu Demokrat tetap menerima kondisi tersebut, serta tetap bisa bekerja sama dengan pemerintahan SBY. Sehingga dikatakan Nurhayati pada tahun 2009 Demokrat kembali memenangkan Pemilu dan baru mendapat kursi pimpinan DPR. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Warna-warni

Ketua BURT Roem Kono didampingi Anggota BURT A.A. Bagus Mahendra Putra meninjau Press Room DPR RI



MNC Group Siap Bantu DPR



Pimpinan DPR RI diterima CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo

MNC Grup menyatakan siap membantu publikasi kebijakan-kebijakan DPR lewat bantuan penyediaan akses televisi yang ditempatkan di berbagai sarana publik. Dengan begitu, semua aktivitas dan kebijakan DPR tersosialisasikan dengan baik ke tengah masyarakat.

Hary Tanoesoedibjo, CEO MNC Group saat menerima kunjungan Pimpinan DPR, Kamis sore (6/11), menyatakan kesiapannya membantu Humas dan Pemberitaan DPR, memfasilitasi publikasi

aktivitas DPR dengan menempatkan box televisi di berbagai rumah sakit, stasiun, terminal, dan tempat-tempat antrian publik seperti sarana pembuatan SIM, KTP, dan lain-lain.

“Sebagai media publik, kita punya kewajiban bagaimana ikut membantu menyuarakan program-program pemerintah maupun DPR kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa lebih paham. Kita tentu dengan senang hati membantu DPR untuk bisa menyebarkan informasi tentang kegiatan parle-

men kepada masyarakat. Secepatnya bisa kita berikan. Dengan demikian ada sinergi yang baik dengan DPR,” ungkap Hary usai pertemuan.

Kerja sama ini disambut baik oleh Pimpinan DPR yang saat itu hadir lengkap, baik Ketua DPR Setya Novanto dan empat wakilnya masing-masing Fadli Zon, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Pertemuan yang sangat akrab itu, dihadiri pula oleh semua Pemimpin Redaksi Media yang tergabung dalam MNC Group, seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan semua kanal MNC, termasuk Okezone.com.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam pertemuan tersebut, mengatakan, sosok Hary Tanoe adalah pengusaha yang berani mengambil risiko, sehingga ia sangat sukses membangun usahanya. Bangsa ini pun harus berani mengambil risiko agar bisa maju. Sementara Taufik Kurniawan menyatakan, situasi politik di DPR yang terus dinamis akhir-akhir ini, membutuhkan dukungan media massa untuk memberitakannya secara objektif. (mh)/foto:andri/parle/iv.

Mitra Kerja Komisi Mulai Ditetapkan

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dan Fraksi mulai menetapkan mitra kerja komisi-komisi. Sempat terjadi banyak perdebatan soal penempatan mitra kerja terkait nomenklatur baru kementerian.

Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Fraksi Pengganti Rapat Bamus dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, menetapkan mitra kerja untuk 11 komisi di DPR, Senin (3/11). Selanjutnya pasangan kerja komisi ini disahkan di Rapat Paripurna DPR. Sempat terjadi perdebatan ke mana harus menempatkan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pada periode sebelumnya Kemenristek masuk Komisi VII. Sementara pendidikan tingginya masuk Komisi X. Dua bidang ini anggarannya juga terpisah. Namun, akhirnya ditetapkan masuk ke Komisi VII, karena rumah besar kelembagaannya dinilai masuk ke riset teknologi. Yang juga sempat menjadi perdebatan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah sempat terjadi tarik menarik antara Komisi IV atau VII, akhirnya ditetapkan masuk ke Komisi IV.

Secara umum semua mitra kerja komisi tidak jauh berbeda



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat Rapat Konsultasi

dengan mitra kerja periode sebelumnya. Dua Wakil Ketua DPR lainnya, Fahri Hamzah dan Agus Hermanto juga hadir memimpin rapat konsultasi ini. Semua fraksi hadir dalam rapat tersebut, kecuali F-PDI Perjuangan, F-PKB, F-Nasdem, dan F-

Hanura.

Dalam rapat tersebut ditetapkan pula penamaan komisi. Komisi I adalah Komisi Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika. Komisi II: Komisi Dalam Negeri, Pemilu, dan Sekneg. Komisi III: Komisi Hukum, HAM, dan Keamanan. Komisi IV: Komisi Lingkungan Hidup, Pertanian, dan Maritim. Komisi V: Komisi Infrastruktur dan Pembangunan. Komisi VI: Komisi

Perdagangan dan Perindustrian. Komisi VII: Komisi Riset dan Energi.

Sementara Komisi VIII: Komisi Agama dan Sosial. Komisi IX: Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Komisi X: Komisi Pendidikan, Pariwisata, dan Olahraga. Dan Komisi XI; Komisi Keuangan dan Perbankan. (mh)/foto:andri/parle/iw.

Usulan Pasangan Komisi Ditetapkan



Jajaran Pimpinan DPR RI

Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Fraksi DPR telah menetapkan usulan pasangan mitra kerja komisi-komisi. Pasangan ini lebih ditujukan pada lembaga bukan sektor. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, didampingi Fahri Hamzah dan Agus Hermanto. Rapat yang berlangsung Senin, (3/11), menetapkan usulan mitra kerja komisi sebagai berikut.

Komisi I: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI/Mabes TNI (AD, AU, AL), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara, Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Lembaga Sandi Negara, LPP TVRI, LPP RRI, Dewan Pers, Perum LKBN ANTARA, dan Lembaga Sensor Film.

Komisi II: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Sekretaris Kabinet, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pertanahan Nasional, KPU, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Unit Kerja Presiden

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, dan Setjen MPR dan DPD.

Komisi III: Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, Komnas HAM, Setjen MA, Setjen MK, PPKATK, Komisi Yudisial, LPSK, BNN, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Komisi IV: Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bulog.

Komisi V: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Pertolongan dan Pencarian Nasional, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, dan Badan Pengembangan Surabaya-Madura.

Komisi VI: Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian BUMN, Badan Koordinasi Pena-

naman Modal, Badan Standardisasi Nasional, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Dewan Kawasan Sabang.

Komisi VII: Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi, Kementerian ESDM, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Dewan Riset Nasional, LIPI, Badan Tenaga Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, LAPAN, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas, SKK Migas, Dewan Energi Nasional, PP IPTEK, dan Lembaga Eijkman.

Komisi VIII: Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Wakaf Indonesia.

Komisi IX: Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, BP POM, BNP2TKI, dan BPJS.

Komisi X: Kementerian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional.

Komisi XI: Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, BI, BPKP, BPS, Setjen BPK, OJK, LPSK, lembaga keuangan bukan bank, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Semua usulan pasangan kerja komisi ini segera ditetapkan di Rapat Paripurna DPR, Selasa (4/11) untuk disahkan. (mh,yd)/foto:andri/parle/iw.



Dewan Harap Jaksa Agung dari Kalangan Profesional

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon berharap Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional bukan dari partai politik, agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadli kepada media (seperti dikutip dari laman detiknews.com) menanggapi sudah mengerucutnya nama-nama calon Jaksa Agung, namun hingga kini Presiden Jokowi belum menentukan pilihannya.

“Lebih baik dari kalangan profesional. Kalau dari politisi nanti ada *conflict of interest* yang menyangkut latar belakang mereka,” kata Fadli, Senin (3/11).

Fadli mendukung agar Jaksa Agung berasal dari kalangan profesional. Selain itu, tentu saja tokoh yang menduduki posisi ini harus berintegritas



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

dan memiliki kompetensi.

“Jaksa Agung juga harus memiliki akseptabilitas, bisa diterima di dalam. Kalau dari profesional, ini juga penghargaan terhadap mereka yang sudah berkarier selama ini,” tegas Fadli Zon yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Pemilihan Jaksa Agung memang sudah berlangsung cukup lama. Fadli memaklumi bahwa Jokowi harus berhati-hati menempatkan orang di posisi ini.

“Mudah-mudahan bukan karena tarik-menarik berbagai macam kepentingan,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin terburu-buru menentukan sosok yang menduduki posisi Jaksa Agung. Hingga saat ini calon Jaksa Agung telah mengerucut menjadi tiga atau empat nama calon.

“Sebetulnya sudah mengerucut, tapi pastinya saya belum tahu. Jadi tunggu saja. Kurang lebih ada 3 sampai 4 nama calon,” kata Tedjo di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11). (sc)/foto: iwan armanias/parle/iw.

DPR Akan Kaji Tambah 3 Komisi, Dukung Pemerintahan Jokowi



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Dalam waktu dekat, DPR akan melakukan kajian untuk membentuk Komisi tambahan. Pembentukan Komisi tambahan ini ditujukan guna mengefektifkan kinerja dewan terkait perubahan nomenklatur di pemerintahan Jokowi. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

kepada pers sesuai rapat konsultasi Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi di ruang Pansus B, Senin (03/11).

“Kita tanya kepada Sekjen berapa kemampuan mengubah ruang rapat komisi yang ada balkonnnya supaya wartawan bisa meliput dari atas, dijelaskan hanya ada empat belas. Itu pun satu bersama dengan baleg karena itu maksimum hanya bisa menambah 3 komisi lagi”, ujarnya.

Politisi PKS ini pun menambahkan bahwa semuanya itu harus di paripurnakan terlebih dahulu dengan mencabut 11 Komisi yang sebelumnya sudah ditetapkan dan pada akhirnya menambah 3 Komisi lagi.

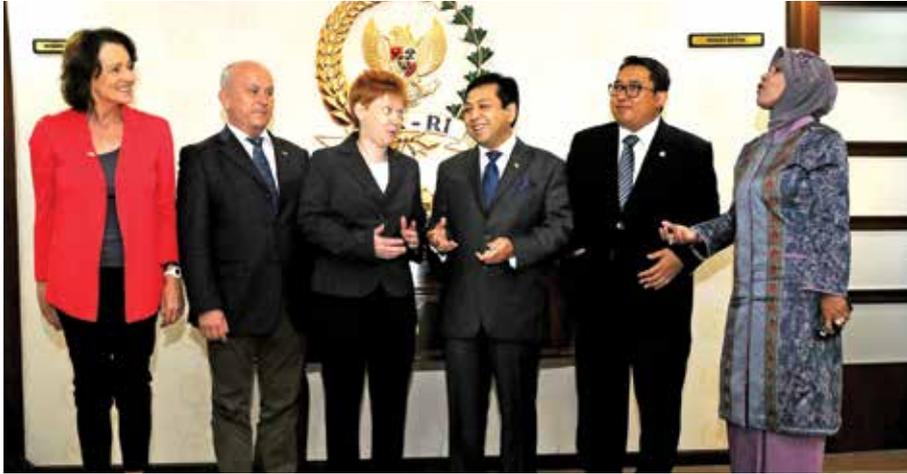
“Kajian saya itu sangat ideal sebab nanti komisi pertahanan dan luar negeri fokus, komisi informasi dan komisi maritim. Kalau saya mengusulkan maritim itu harus jadi komisi karena

itu visi besarnya Pak Jokowi dan ada menko nya,” ujarnya.

Karena itu pula dia mengusulkan ada komisi maritim dan komisi riset, karena ingin fokus kepada riset dan riset harusnya menjadi komisi. Selain itu, reformasi birokrasi harus menjadi komisi guna mengkoordinir pembentukan aparaturnegara di seluruh lini supaya terintegrasi dengan pemberantasan korupsi terkait pencegahan.

Pimpinan Dewan dari FPKS ini mengajak seluruh fraksi yang belum memberikan nama-nama anggota fraksi untuk segera menyetorkan nama-namanya agar bisa dimasukkan ke alat kelengkapan dewan. Menurutnya, jika pembentukan komisi tambahan disepakati, maka bisa jadi pimpinan komisinya berasal dari fraksi yang belum menyetorkan nama. (mp,yd)/foto: iwan armanias/parle/iw.

Pimpinan DPR Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Jerman



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat menerima Delegasi Parlemen Jerman

Pimpinan DPR RI yang didampingi Ketua BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen), Nurhayati Ali Assegaf menerima kunjungan Delegasi Parlemen Jerman di ruang tamu pimpinan, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

“Jerman sebagai Negara pendiri Uni Eropa dengan segala potensi yang ada sangat strategis untuk bisa saling melengkapi dalam hubungan bilateral dengan Indonesia yang notabene merupakan Negara terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berharap agar kerjasama Indonesia-Jerman dapat lebih ditingkatkan lagi,” jelas Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Dijelaskan Novanto, selama ini hubungan kedua negara sangat baik, hal itu ditandai dengan adanya beberapa kerjasama, salah satunya kerjasama dalam bidang riset dan teknologi, bidang pertahanan, serta bidang ekonomi perdagangan.

Ditambahkan Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf yang ikut mendampingi pimpinan DPR RI, mengatakan bahwa selaku anggota Komisi I DPR RI secara langsung ia pernah turut terlibat dalam kerjasama di bidang militer, yakni lewat pembelian Leopard yang menjadi salah satu alutsista andalan bagi Indonesia saat ini.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Delegasi Parlemen Jerman, MS. Petra Pau mengatakan bahwa pihaknya sangat berterimakasih dengan sambutan yang cukup hangat dari DPR RI. Dia sepakat kerjasama antara Indonesia dan Jerman harus lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Hal ini bisa dilakukan oleh badan-badan resmi yang dimiliki masing-masing parlemen maupun antar kolega.

“Kami ingin mengetahui bagaimana rencana kerja Parlemen Indonesia (DPR RI) dalam konteks ASEAN, dimana jika ada isu yang berkembang di kawasan tersebut dapat segera bereaksi dengan cepat, sehingga efeknya tidak terasa untuk masyarakat di kawasan tersebut,” kata Petra Pau.

Menanggapi hal tersebut Ketua BKSAP, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa saat ini di ASEAN memiliki organisasi *Inter Parliamentary* atau AIPA yang merupakan organisasi parlemen-parlemen se-ASEAN yang sekertariatnya berkantor di gedung DPR RI. Selain itu, kerjasama dalam bidang ekonomi lewat *ASEAN Economic Community*. Sehingga segala permasalahan yang ada di kawasan ASEAN dapat teratasi dan sejauh ini menurut Nurhayati dapat berjalan dengan baik.

(Ayu) foto: iwan armanias/parle/iv.

Masih Terbuka KIH Masuk Pimpinan Komisi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, masih terbuka pimpinan komisi diambil oleh Koalisi Merah Putih (KMP) termasuk pimpinan BURT dan Badan Anggaran (Banggar). Yang penting nama-nama masuk dulu di Komisi dan dibicarakan di forum Komisi yang bersangkutan. Apalagi sedang dikaji kemungkinan untuk menambah jumlah Komisi di DPR.

“Semua bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan. Yang jelas dimusyawarahkan di komisi yang bersangkutan, jangan di rapat paripurna,” ungkap



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Fahri usai mengikuti rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi di Gedung DPR, Senin (3/11).

Kemungkinan menambah komisi juga ditanyakan kepada Setjen DPR bahwa ruang rapat komisi yang memadai termasuk ruang balkon untuk peliputan wartawan semuanya berjumlah 14 satu diantaranya telah digunakan Baleg. Dengan demikian penambahan komisi dari yang sekarang sebanyak 11 komisi ditambah maksimal 3, menjadi 14 komisi.



Namun perlu menjadi catatan, lanjut Fahri, pada periode DPR lalu, Banggar dituduh *kongkalikong*. Sebetulnya dengan satu kubu saja yang memimpin Banggar, itu tidak bisa lagi *kongkalikong*, dan itu bagus bagi rakyat sebab bisa saling intip. Tapi kalau nanti gabung lagi, bisa *kongkalikong* lagi. “Jadi saya heran, kenapa kita tidak menerima sistem ini supaya *check and balances* nya baik. Nggak bisa macam-macam Pimpinan Banggar dan Pimpinan Komisi yang lain,” tegasnya dengan menambahkan, jadi KIH sebagai kenyataan, masuklah ke alat kelengkapan lain sehingga riil pengawasannya. “Itu akan hebat sekali”.

Dalam kajian yang dilakukan, lanjut

Fahri, penambahan komisi sangat ideal, misalnya komisi pertahanan dan luar negeri fokus, komisi informasi dan Komisi maritime perlu ditangani komisi khusus sebab ini visi besarnya Presiden Jokowi dan ada Menkonya. Juga ristek ada satu komisi dan reformasi birokrasi, harus jadi satu komisi karena mengkoordinir pembentukan aparaturnya di seluruh lini, supaya terintegrasi dengan pemberantasan korupsi terkait pencegahan.

“Jadi rekan-rekan anggota yang bergabung dalam KIH masuklah di komisi dan AKD kemudian bisa bicara enak. Kalau nggak, apa boleh buat, AKD dan komisi dan sudah ada pimpinannya akan jalan terus. Itu semua sudah

sesuai UU dan tatib. Jadi mari ikut bareng-bareng,” ajak Pimpinan Dewan dari Fraksi PKS.

Dia kembali menegaskan, pihaknya menunggu dan terus melakukan komunikasi setiap saat. “Sudahlah, nggak bisa Dewan itu dilawan, DPR sekarang ini sah dan nggak boleh ada dualisme. KIH boleh rapat kesana kemari, itu bukan rapat DPR. Kalau menggelar rapat tidak ada dasar hukumnya seperti rapat paripurna sesuai UU MD3 prosedurnya sudah diatur detail. Karena itu dia mengajak gabung, nanti ada jalan keluarnya,” kata Fahri menambahkan.

(mp) foto:iwan armanias/parle/iw.

Ketua DPR Akan Buka Komunikasi Dengan Semua Pimpinan Fraksi

Ketua DPR, Setya Novanto memberikan perhatian terhadap polemik internal terkait munculnya pimpinan DPR dari Koalisi Indonesia Hebat. Untuk menyelesaikan masalah, dia akan membuka komunikasi dengan semua pimpinan fraksi.

“Saya sebagai pimpinan DPR tetap melakukan komunikasi aktif. Ini suatu kebersamaan bersama juga pimpinan DPR lain. Tidak ada perbedaan, kita terbuka untuk melakukan pembicaraan,” ujar Novanto kepada media di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

Ia bahkan tak menutup kemungkinan pemilihan pimpinan komisi yang



Ketua DPR RI Setya Novanto

telah dilakukan bisa diulang. Asal ada kesepakatan kedua kubu, pemilihan

pimpinan komisi sangat terbuka untuk diulang.

“Ya semuanya kalau bisa bicara, duduk bersama, kita tunduk kok, enggak ada masalah,” ujarnya.

Novanto juga memberikan apresiasi terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang telah memberi saran untuk persatuan DPR.

“Apalagi saya apresiasi Pak Jokowi dan JK yang sudah beri saran, komunikasi, tentu kita sangat menghargai betul,” ujar politikus Golkar itu. (sc) foto:iwan armanias/parle/iw

Legislator Minta Pemerintah Tidak Naikkan BBM



Politisi Golkar Firman Subagyo

Pemerintah Jokowi diminta tidak menaikkan harga BBM mengingat PDI Perjuangan telah memiliki Buku Putih yang isinya antara lain penolakan kenaikan BBM yang telah dikeluarkan 2 tahun lalu. “Masih banyak cara untuk tidak melakukan kenaikan BBM,” kata politisi Golkar Firman Subagyo sesaat sebelum mengikuti Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi di Jakarta, Senin (3/11).

Rencana kenaikan BBM sudah beberapa kali disampaikan oleh pemerintah, bahkan semula akan dilakukan pada bulan Nopember ini, namun Menko Ekuin Sofyan Jalil mengatakan kenaikan paling lambat pada akhir Desember mendatang.

Menurut Firman yang kini menjabat Wakil Ketua Baleg, pada saat kampanye lalu Jokowi pernah mengatakan tidak akan menaikkan harga BBM.



Jadi setelah menjadi Presiden jangan mengecewakan rakyat, dan janji untuk tidak menaikkan harga BBM hendaknya ditangguhkan dulu.

Mengenai rapat yang digelar ia mengatakan, membahas ruang kerja dan pasangan kerja komisi-komisi DPR de-

ngan pemerintah sehubungan pembentukan Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Meski tidak dihadiri Koalisi Indonesia Hebat (KIH) rapat ini tetap dilanjutkan dan sah adanya. “Rapat tetap sah dan akan dilanjutkan untuk segera alat-alat kelengkapan Dewan dan komisi-komisi bisa segera bekerja,” ujarnya.

Terkait masih terbelahnya dua kubu DPR, Firman mengatakan, KIH semula tidak dapat bagian, lalu minta 3 lalu 5 dan akhirnya minta 16 jabatan di Pimpinan Komisi dan AKD. “Yang rasional sajalah, toh di kementerian KMP tidak menuntun apa-apa,” katanya. (mp)/
foto:andri/parle/iw.

DPR Apresiasi Program Kartu Indonesia Sehat

Ketua DPR, Setya Novanto apresiasi rencana peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) oleh Presiden Jokowi. Program tersebut dianggap memperhatikan rakyat miskin.

“Saya betul-betul apresiasi, bagaimanapun itu mendukung rakyat kecil,” ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11).

Politisi Partai Golkar ini tidak mengetahui detail soal program andalan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla itu.

“Saya hanya baca di koran dan media lain,” ujar Setya.

Dia mengatakan, sepanjang program itu demi kesejahteraan rakyat, pihaknya mendukung.



Ketua DPR RI Setya Novanto

Presiden Jokowi akan meluncurkan Program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, Senin ini. Peluncuran dilaksanakan di Kantor Pos Jakarta Pusat, pukul 11.30 WIB.

Ini merupakan salah satu program kompensasi untuk mengurangi dam-

pak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Pada tahap awal, Presiden Jokowi sudah membagikan 500 KIS dan KIP untuk pengungsi letusan Gunung Sinabung. Kartu ini baru bisa digunakan pekan ini.

Kartu-kartu ini disiapkan untuk menjadi jaring pengaman bagi rakyat kecil yang akan terimbas saat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dialihkan ke sektor lain.

Sasaran penerima kartu tersebut di tahun 2014 mencapai 432.000 jiwa. Jumlah itu berasal dari 1,7 juta jiwa orang yang masuk kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS kesehatan. (sc)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Digagas Ada Visa On Arrival Indonesia-Mongolia

Pemerintah Mongolia dan Indonesia perlu segera menggagas pemberian visa on arrival untuk memudahkan kunjungan wisata bagi warganya di kedua negara. Dengan begitu, masyarakat di kedua negara saling mengenal kultur dan kebudayaan masing-masing.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Meutya Viada Hafid mengungkapkan hal tersebut usai menerima delegasi parlemen Mongolia di DPR, Jumat (31/10). Gagasan mengadakan visa on arrival sangat disambut baik kedua belah pihak. “Tadi ada permintaan khusus visa on



Wakil Ketua BKSAP DPR Meutya Viada Hafid

arrival untuk meningkatkan pariwisata antara dua negara,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Seperti diketahui dengan fasilitas visa on arrival, para pemegang paspor cukup mengurus visa saat kedatangannya di bandara negara tujuan dengan membayar biaya administrasi. Jadi, tidak perlu mengurus visa sebelumnya di negara asal. Ini tentu memudahkan sekaligus menggairahkan angka kunjungan wisata di kedua negara.

“Kadang kita malas berkunjung ke luar negeri, karena susah mengurus

visanya. Saya mendukung ide itu, sehingga memudahkan berkunjung ke Mongolia. Kalau sekarang ingin kerja sama pariwisata, tapi urusan visanya masih susah, maka sulit untuk menjalin kerja sama pariwisata,” kata Meutya.

Ditambahkan anggota Komisi I DPR ini, kultur kita hampir sama dengan masyarakat Mongolia. Secara fisik juga ternyata tak jauh beda. “Kita punya banyak kemiripan. Kalau kita berdiri berjejer, mungkin tidak ada yang tahu kalau itu dari Mongolia, karena muka-

nya mirip. Tata bicara dan kesantunannya juga enggak jauh berbeda. Tapi, yang jauh berbeda adalah buminya. Di sana dingin sekali, di sini hangat. Itulah yang bisa kita kuatkan hubungannya dengan Mongolia.” (mh)/foto:iwan armarnias/parle/iw.

Susunan Lengkap Pimpinan AKD DPR Kecuali Badan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah melaksanakan pemilihan dan penetapan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), kecuali Badan Anggaran (Banggar).

Sampai berita ini dilansir, DPR belum melakukan pemilihan dan penetapan Pimpinan Banggar yang dijadwalkan dilakukan Senin (3/11). Berikut susunan pimpinan Komisi dan AKD yang ditetapkan DPR RI,

Pimpinan Komisi I DPR terdiri dari :

Ketua Mahfudz Sidiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS),
Wakil Ketua Tantowi Yahya dari Fraksi Partai Golkar (F-PG),
Wakil Ketua Asril Hamzah Tandjung dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra),
Wakil Ketua Hanafi Rais dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Pimpinan Komisi II DPR terdiri dari :

Ketua Rambe Kamarulzaman (F-PG),
Wakil Ketua Ahmad Riza Patria (F-Gerindra),
Wakil Ketua Wahidin Halim dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD),
Wakil Ketua Mustafa Kamal (F-PKS).

Pimpinan Komisi III DPR terdiri dari :

Ketua Aziz Syamsudin (F-PG),
Wakil Ketua Desmon Junaidi Mahesa (F-Gerindra),
Wakil Ketua Benny Kabur Harman (F-PD),
Wakil Ketua Mulfahri Harahap (F-PAN).

Pimpinan Komisi IV DPR terdiri dari :

Ketua Edhi Prabowo (F-Gerindra),
Wakil Ketua Siti Hediati Soeharto (F-PG),
Wakil Ketua Herman Khaeron (F-PD),
Wakil Ketua Viva Yoga Mauladi (F-PAN).



Suasana Sidang Paripurna

Pimpinan Komisi V DPR terdiri dari :

Ketua Fary Djemy Francis (F-Gerindra)
Wakil Ketua Michael Watimena (F-PD),
Wakil Ketua Muhidin M Said (F-PG),
Wakil Ketua Yudi Widiana (F-PKS).

Pimpinan Komisi VI DPR terdiri dari :

Ketua Achmad Hafisz Tohir (F-PAN)
Wakil Ketua Azam Azman (F-PD),
Wakil Ketua Dodi Reza Alex Noerdin (F-PG),
Wakil Ketua Heri Gunawan (F-Gerindra).

Pimpinan Komisi VII DPR terdiri dari :

Ketua Kardaya Warnika (F-Gerindra),
Wakil Ketua Tamsil Linrung (F-PKS),
Wakil Ketua Mulyadi (F-PD),
Wakil Ketua Satya W Yudha dari (F-PG).

Pimpinan Komisi VIII DPR terdiri dari :

Ketua Saleh Partaonan Daulay (F-PAN),
Wakil Ketua Deding Ishak (F-PG),
Wakil Ketua Sodik Mudjahid (F-Gerindra)
Wakil Ketua Ledia Hanifa Amaliah (F-PKS).

Pimpinan Komisi IX DPR terdiri dari :

Ketua Dede Yusuf Macan Effendi (F-PD),
Wakil Ketua Syamsul Bachri (F-PG),
Wakil Ketua Pius Lustrilang (F-Gerindra),
Wakil Ketua Asman Abnur (F-PAN).

Pimpinan Komisi X DPR terdiri dari :

Ketua Teuku Riefky Harsya (F-PD)
Wakil Ketua Ridwan Hisyam (F-PG),
Wakil Ketua Nuroji (F-Gerindra),
Wakil Ketua Sohibul Iman (F-PKS).

Pimpinan Komisi XI DPR terdiri dari :

Ketua Fadel Muhammad (F-PG),
Wakil Ketua Gus Irawan Pasaribu (F-Gerindra),
Wakil Ketua Marwan Cik Asan (F-PD),
Wakil Ketua Jon Erizal (F-PAN).

Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR terdiri dari :

Ketua Roem Kono (F-PG),
Wakil Ketua Novita Wijayanti (F-Gerindra),
Wakil Ketua Agung Budi Santoso (F-PD)

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terdiri dari :

Ketua Surahman Hidayat (F-PKS)
Wakil Ketua Lili Asdjudiredja (F-PG),
Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra).

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR terdiri dari :

Ketua Sareh Wiyono (F-Gerindra)
Wakil Ketua Firman Subagyo (F-PG),
Wakil Ketua Saan Mustofa (F-PD),
Wakil Ketua Totok Daryanto (F-PAN).

Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR terdiri dari :

Ketua Nurhayati Ali Assegaf (F-PD),
Wakil Ketua Meutya Hafid (F-PG),
Wakil Ketua Teguh Juwarno (F-PAN),
Wakil Ketua Rofi'i Munawar (F-PKS). (as)

Ketua BURT Kunjungi Bagian Pemberitaan dan Press Room DPR

Sebagai lembaga tinggi Negara, DPR harus memiliki kewibawaan yang tinggi, hal itu dapat tercermin dari sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karenanya, ada berbagai perbaikan yang harus segera dilakukan terkait sarana dan prasarana di Gedung DPR RI, Senayan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua BURT, Roem Kono saat melakukan kunjungan ke ruang Bagian Pemberitaan dan Press Room DPR RI, Senayan, Jakarta, termasuk ke dapur Redaksi Parlemen, Jumat (31/10).

“DPR sebagai lembaga tinggi Negara sudah pasti paling banyak menerima tamu baik itu tamu kenegaraan dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu sarana dan prasarananya juga harus segera diperbaiki. Karena gedung merupakan simbol dari lembaga itu sendiri,” ujar Roem Kono.

Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam sisi sarana dan prasarana. Diantaranya adalah penataan lobi Gedung Nusantara III yang kerap menjadi tempat penerimaan tamu Negara. *Press room* atau media center di Gedung Parlemen dikatakan Roem Kono juga harus ditata ulang, mengingat tidak sedikit wartawan yang lebih memilih berada di luar ruang *press* dibanding berada di dalam *media center*. Hal tersebut dikarenakan



Ketua BURT DPR Roem Kono saat meninjau dapur Redaksi Parlemen

kurang memadainya fasilitas di dalam ruangan.

“Sebenarnya tidak hanya *media center* atau *press room* saja yang harus segera ditata ulang, ruang anggota yang luasnya hanya 28 meter persegi dengan ukuran 4X7 meter, jelas sangat sempit untuk didiami seorang anggota dengan beberapa orang stafnya. Belum lagi jika menerima tamu pejabat Negara, tentu kondisi tersebut cukup memprihatinkan,” ungkap Roem Kono kepada wartawan yang ada di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta

Sementara di negara lain, dilanjutkan Roem, ruang pejabat negara termasuk anggota parlemen minimal 105 meter. Untuk anggota DPR RI sendiri tentu Roem tidak ingin mengikuti kondisi negara lain, namun paling tidak lebih diperluas, misalnya dengan menambah satu kali lagi luas ruangan anggota yang sudah ada saat ini. Mudah-mudahan penataan ulang plus penambahan luas ruang anggota itu dikatakan Roem dapat segera terlaksana. Oleh karenanya ia mohon dukungan untuk semua pihak. (Ayu)/
foto:iwan armanias/parle/iw.

Mongolia Tertarik Berinvestasi di Indonesia

Hubungan bilateral Indonesia dan Mongolia sudah lama terjalin. Parlemen kedua negara juga sudah menjalin kerja sama yang sangat erat dan memiliki grup kerja samanya

sendiri. Dan Pemerintah Mongolia mulai tertarik menanamkan investasinya di Indonesia..



Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf saat menerima Parlemen Mongolia

Demikian terungkap dalam pertemuan Parlemen Mongolia dengan DPR. Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf, Jumat (31/10), menerima Ketua Kelompok Persahabatan Parlemen Mongolia Otyaber Baasankhuu di DPR. “Mereka sangat tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Ini menyen-

angkan sekali. Dan tentu diplomasi parlemen ini kami lakukan yang utama adalah untuk kepentingan nasional,” ungkap Nurhayati.

Nurhayati yang didampingi Wakil Ketua BKSAP Muetya Viada Hafid (F-PG), menyambut baik keinginan pemerintah Mongolia berinvestasi. Banyak peluang investasi yang bisa dijangkau di Indonesia, seperti bidang pertanian dan pariwisata. Kebetulan Mongolia juga baru membuka Kedubesnya di Jakarta. Jadi, ini kesempatan yang sangat baik untuk men-

ngakrabkan hubungan kedua negara. Dalam kesempatan itu, Nurhayati juga sekaligus mengundang Parlemen Mongolia untuk hadir dalam pertemuan MDGs yang diadakan DPR di Surabaya pertengahan November nanti. “Hubungan Indonesia-Mongolia sudah lama terjalin. Kita punya grup kerja sama Indonesia-Mongolia dan ingin berinvestasi di Indonesia. Mereka juga ingin mengirim *people to people* untuk menambah kunjungan pariwisatanya ke Indonesia, supaya mereka mengenal budaya Indonesia,” papar Nurhayati. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

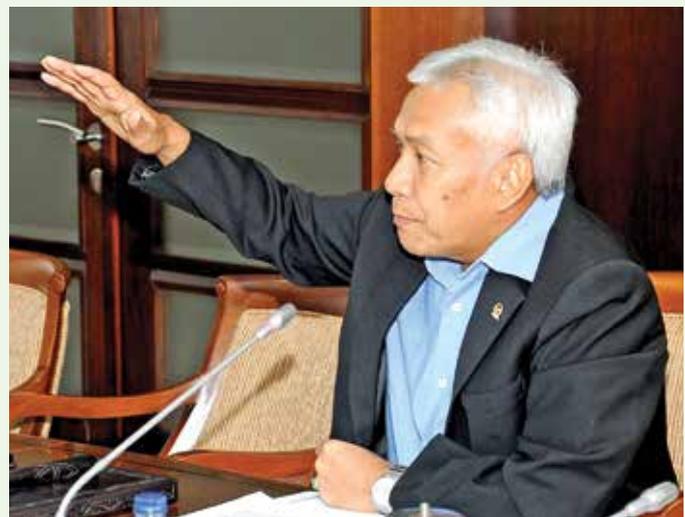
Ada Penurunan Jumlah Pasar Tradisional

Dari tahun ke tahun ternyata jumlah pasar tradisional terus menurun. Banyak penyebab penurunan jumlah pasar tersebut, di antaranya soal serbuan pasar modern dan kebakaran pasar. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR.

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Rabu (5/11) di Ruang Rapat Pimpinan DPR. Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri, mengungkapkan, data tahun 2011 ada 9.550 pasar tradisional yang tersisa di Indonesia dari 13.550 pasar di tahun 2007. Tren penurunan ini perlu mendapat perhatian serius dari DPR dan pemerintah.

Dua penyebab penurunan jumlah pasar tradisional sudah menjadi tren di hampir semua daerah. Pertama, menjamurnya pasar modern telah menggerus keberadaan pasar tradisional. Bahkan, pembangunan pasar modern sudah bersinggungan langsung ke titik-titik pasar tradisional. Kedua, kebakaran pasar hampir setiap hari terjadi. Dan pasca-kebakaran Pemda biasanya mendiamkan begitu lama, tanpa direvitalisasi.

Agus Hermanto yang menerima delegasi IKAPPI mengatakan, revitalisasi pasar harus didorong untuk mengembangkan pasar tradisional. Agus yang didampingi Pimpinan Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tohir dan Azam Azman Natawijana itu, menambahkan, persoalan pasar tradisional sudah menjadi konsen DPR, agar para pedagang di pasar-pasar tradisional bisa terus berdagang dan berdekatan



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

dengan masyarakat.

Sementara itu, Achmad Hafisz Tohir Ketua Komisi VI DPR mengatakan, pasar tradisional tidak mungkin dihilangkan. Justru keberadaannya sangat penting di tengah masyarakat. Untuk itu, perlu diberi perlindungan dan pembinaan. Anggota F-PAN ini, menegaskan, pasar tradisional tak boleh tergerus oleh keberadaan pasar modern. Untuk itu, para pedagang dan pengurus pasar tradisional perlu ditingkatkan *skill* manajerialnya. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Wakil Ketua DPR RI/Korinbang Agus Hermanto didampingi Pimpinan Komisi VI Achmad Hafisz Tohir dan Azam Azman Natawijaya beraudiensi dengan DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, Rabu (5/11)
Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.



Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam Fadli Zon menerima Vikhram Nehru membahas perkembangan politik di Indonesia, Rabu (5/11) Foto: Andri/Parle/Hr.



Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dan Wakil Ketua Heri Gunawan beraudiensi dengan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), Kamis (6/11) Foto: Iwan Armanias/Parle/Hr.